



DALAM EDISI BULAN INI

- 01 Lokakarya Perencanaan Program FORCLIME 4.0 di Tanah Papua 25 dan 29 Maret 2021
- 02 Selamat datang anggota baru FORCLIME 4.0
- 03 Persiapan kantor di Tanah Papua
- 04 Webinar: Pembangunan Kehutanan setelah Undang-undang Cipta Kerja 10 April 2021
- 05 FORCLIME 4.0 siapkan rencana kerja 2021 di Tanah Papua
- 06 FORCLIME dan Kemendes jagati potensi kerja sama terkait pemberdayaan desa 22 April 2021
- 07 FORCLIME dukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan rancang evaluasi program Bakti Rimbawan 2021

Editorial

Dalam edisi bulan Mei ini, Newsletter FORCLIME menampilkan berita persiapan operasionalisasi FORCLIME 4.0 di Tanah Papua. Kegiatan awal sebelum melakukan aktivitas di Tanah Papua adalah perkenalan dengan para pihak di Papua dan Papua Barat melalui Lokakarya Perencanaan Program FORCLIME di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua. Melalui kedua pertemuan tersebut kami mengumpulkan informasi dari para pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan FORCLIME. Dalam edisi ini, kami juga ingin memperkenalkan staf baru FORCLIME yang akan bertugas di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang merupakan hasil dari proses rekrutmen pada bulan Maret yang lalu, dan sebagai hasilnya lebih dari 50 persen staf kami di daerah adalah perempuan. Pada tahap persiapan ini, Biro Perencanaan KLHK, selaku *Executing Agency* mendampingi keseluruhan proses mulai dari penyiapan program kegiatan dan proses rekrutmen staf baru untuk FORCLIME di Tanah Papua. Untuk itu, kami menyambut baik dan memberi perhatian khusus bahwa FORCLIME 4.0 telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh para pihak baik pusat dan daerah.

Hal penting lainnya terkait persiapan operasionalisasi FORCLIME 4.0 adalah kantor resmi kami di daerah. Kami sangat berterima kasih kepada Dinas Kehutanan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah mengalokasikan ruangan untuk tim FORCLIME bekerja. Bangunan/ruangan yang disediakan tersebut sedang dipersiapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja tim FORCLIME 4.0.

Berita lainnya adalah webinar tentang Pembangunan Kehutanan setelah Undang-undang Cipta Kerja. Dalam webinar tersebut para pakar kehutanan Indonesia membahas tentang implikasi penerapan UU CK pada pembangunan kehutanan termasuk pada pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan. Selain itu, dalam rangka mengidentifikasi potensi kerja sama terkait pemberdayaan desa, termasuk desa adat di Tanah Papua, FORCLIME dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) melalui Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengadakan pertemuan koordinasi membahas potensi kerja sama di lokasi kegiatan FORCLIME di Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah yang beririsan dengan lokasi prioritas Kemendes.

Dalam rangka mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Program Bakti Rimbawan serta tantangan yang dihadapi, Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak FORCLIME untuk bekerja sama melakukan evaluasi Program Bakti Rimbawan yang akan berakhir tahun 2021. Hasil evaluasi diharapkan akan menghasilkan opsi-opsi *exit strategy* program Bakti Rimbawan.



Mohammad Sidiq

Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan koordinator untuk Tanah Papua

Lokakarya Perencanaan Program FORCLIME 4.0 di Tanah Papua 25 dan 29 Maret 2021



Menindaklanjuti peluncuran program FORCLIME 4.0 di awal tahun, Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagai *Project Executing Agency* FORCLIME, memperkenalkan FORCLIME 4.0 kepada para pihak di Papua Barat pada tanggal 25 Maret 2021 di Manokwari. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi dari para pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan FORCLIME, yang kemudian akan dibahas dengan mitra proyek di tingkat provinsi dan kabupaten. Topik utama dalam pertemuan tersebut adalah analisis pohon masalah terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perhutanan sosial dan konservasi keanekaragaman hayati, serta identifikasi kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Pertemuan yang dilakukan secara daring dan luring ini dihadiri oleh 43 orang yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Papua Barat, Pemprov (Badan Litbang Daerah-Balitbangda), mitra pembangunan, LSM lokal, perguruan tinggi setempat.

“Rencana kegiatan program FORCLIME 4.0 sudah sesuai dengan rencana kerja KPH di Papua Barat, termasuk KPH Tambrauw.” kata Petrus Tawer, Kepala KPH Tambrauw.

FORCLIME melanjutkan lokakarya perencanaan di Jayapura pada tanggal 29 Maret 2021. Acara yang dibuka oleh Bapak Estiko Tri Wiradyo dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua ini dihadiri oleh 53 peserta yang mewakili perguruan tinggi lokal, mitra pembangunan, pemerintah provinsi, LSM lokal. Hasil lokakarya perencanaan di Manokwari dan Jayapura akan dirumuskan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, yang kemudian akan dijadikan pedoman bagi FORCLIME untuk melaksanakan kegiatannya pada tahun 2021 di kedua provinsi tersebut. Pengembangan rencana kerja tahunan akan melibatkan mitra terkait di tingkat provinsi dan kabupaten.

Selamat datang anggota baru FORCLIME 4.0

Dengan mulai beroperasinya FORCLIME 4.0 di Tanah Papua, tentunya perlu tenaga-tenaga profesional untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Mulai 1 Mei 2021, anggota keluarga FORCLIME 4.0 bertambah enam orang yang nantinya akan ditempatkan di Papua dan Papua Barat, yang akan bertugas sebagai koordinator, junior adviser, dan tenaga profesional administrasi dan keuangan untuk masing-masing provinsi. Kegiatan *on-boarding* anggota baru tersebut akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Mei sampai dengan 5 Juni 2021, termasuk kunjungan perkenalan ke kantor GIZ Indonesia, KLHK dan Bappenas.

Staf teknis akan bekerja dibawah supervisi Manajer bidang strategis untuk Pengelolaan Hutan Lestari, Mohammad Sidiq, yang juga berperan sebagai koordinator Tanah Papua. Sedangkan staf administrasi dan keuangan akan bekerja di bawah supervisi *Senior Administrative Professional*, Fransisca Sri Widiarti.

Dengan penuh sukacita, kami perkenalkan anggota baru FORCLIME 4.0:



Nita Yohana, Advisor untuk bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan juga sebagai Koordinator Provinsi Papua Barat.

Nita adalah sarjana dari Universitas Riau dan telah memiliki sembilan tahun pengalaman kerja di Papua Barat. Bidang kerja yang digelutinya terkait dengan konservasi dan lingkungan hidup. Nita berpengalaman dalam pengelolaan proyek, perencanaan program, kebijakan, tata kelola. Selain itu, Nita juga berpengalaman dalam kegiatan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintahan dan juga masyarakat. Nita akan berkantor di Manokwari.



Melanesia Brigitte Boserem, Advisor Junior bidang Pengelolaan dan Konservasi Hutan.

Sebelum bergabung dengan FORCLIME 4.0, Melanesia telah memiliki tiga tahun pengalaman kerja, dan pernah magang di FORCLIME melakukan kajian mengenai [sagu](#) dan [masoi](#).

Melanesia adalah lulusan sarjana dari Universitas Papua dan mendapatkan gelar Master di bidang sains lingkungan dari Universitas Auckland, Selandia Baru.



Vinsensius Sabon Aman, staf administrasi dan keuangan untuk Papua Barat

Vinsen adalah sarjana ekonomi akuntansi dari Universitas Victory, Sorong, Papua Barat. Telah memiliki enam tahun pengalaman kerja di bidangnya. Vinsen akan berkantor di Manokwari.



Theodora Florida Resubun, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan juga sebagai Koordinator Provinsi Papua.

Thea, nama panggilannya, adalah sarjana kehutanan dari Universitas Papua, dan memiliki 15 tahun pengalaman kerja di wilayah Papua.

Keahliannya meliputi isu kehutanan dan masyarakat adat termasuk hutan kemasyarakatan, bekerja dengan pemerintah daerah baik di tingkat desa hingga tingkat provinsi dan nasional, perencanaan program, evaluasi dan program pemantauan.



Ruth Miserikodiasdomini Ohoiwutun,

Advisor Junior bidang Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat di Papua.

Ruth memiliki pengalaman di bidang pengelolaan sumber daya alam, khususnya komunitas adat dan advokasi hak asasi manusia, serta peneliti. Ruth memiliki gelar sarjana Antropologi dari Universitas Cendrawasih



Nurjannahtul Hurriyah Salma Soplely,

Staf administrasi dan keuangan untuk Provinsi Papua dan akan berkantor di Jayapura.

Rini, nama panggilannya, adalah lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Papua dan memiliki 17 tahun pengalaman kerja terkait dengan administrasi, keuangan dan operasional organisasi.



Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan

Ruben adalah Sarjana Kehutanan dari Universitas Papua. Telah memiliki enam tahun pengalaman kerja dengan bidang keahlian sistem informasi geografis (Geographic Information System-GIS).

Dengan keahliannya, Ruben berpengalaman menjadi fasilitator dalam penyusunan peta indikasi masyarakat adat di beberapa distrik di Papua. Sebelum ditempatkan di Papua, Ruben bertugas di FORCLIME kantor Palu, Sulawesi Tengah.

Persiapan kantor di Tanah Papua

FORCLIME 4.0 mulai menyiapkan kantor resmi di lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua di Jayapura, dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat di Manokwari. Kantor tersebut merupakan bangunan atau ruangan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui dinas kehutanan dalam kerangka kerja sama teknis. Pemilihan kedudukan kantor FORCLIME 4.0 di lingkungan dinas kehutanan adalah untuk

memudahkan koordinasi dan operasionalisasi kegiatan program. Untuk operasionalisasinya, FORCLIME menempatkan tiga sampai empat staf di tiap provinsi pada awal Mei 2021.

Kantor resmi FORCLIME di Jayapura terletak di lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Deplat, Jalan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura. Pada saat ini dalam tahap renovasi yakni berupa bangunan kantor tipe 70 dengan infrastruktur berupa ruang kerja dan rapat, dengan fasilitas jaringan internet, dan ruang publikasi. Selanjutnya, kantor di Manokwari berada di lingkungan Dinas Kehutanan Papua Barat di Komplek Perkantoran Bukit Arfai, Jalan Abraham O. Atururi, Kabupaten Manokwari.

Pembangunan Kehutanan setelah Undang-Undang Cipta Kerja

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam secara umum, termasuk kehutanan, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan-perubahan mendasar yang harus dilaksanakan. Undang-undang yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai norma hukum, pengaturan dan pelaksanaannya itu menjadi harapan banyak pihak, karena selama ini berbagai peraturan-perundangan dianggap tidak sinkron satu dengan yang lain serta memberikan wadah perizinan berusaha yang tidak efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Forest For Life Indonesia (FFLI) dan FORCLIME akan mengadakan webinar guna mengkaji implikasi strategi dan praktis dari UU CK dalam implementasi peraturan di bidang kehutanan yang sudah berjalan saat ini, khususnya terkait dengan penyusunan tata ruang daerah, perizinan usaha di kawasan hutan, kelembagaan dan sistem tata kelola kehutanan tingkat tapak.

Narasumber:



Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo
Forests For Life Indonesia (FFLI)



Ir. Madani Mukarom
Asosiasi KPH



Dr. Iman Santoso
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia



Prof. San Afri Awang
Fakultas Kehutanan UGM

RAPPORTEUR : Dr. Agus Djoko Ismanto
MODERATOR : Wandojo Siswanto

Hari, Tanggal: Sabtu, 10 April 2021, 09:00 - 12:00
Tempat: <http://bit.ly/KehutananUUCK>

Webinar: Pembangunan Kehutanan pasca Undang-undang Cipta Kerja 10 April 2021

FORCLIME bekerja sama dengan *Forest for Life Indonesia* mengadakan webinar mengenai Pembangunan Kehutanan pasca Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 10 April 2021 di Bogor, Jawa Barat. Acara yang diselenggarakan secara daring dan luring ini dipandu oleh Manajer bidang strategis FORCLIME untuk kebijakan kehutanan dan perubahan iklim, Wandojo Siswanto, sebagai moderator. Webinar dihadiri oleh 187 peserta yang mewakili akademisi, LSM, pelajar perguruan tinggi, mitra pembangunan, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta.

Prof. Haryadi Kartodihardjo dari *Forest for Life Indonesia* menyampaikan implikasi strategis UUCK terhadap aspek perizinan, kemasayarakatan, dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di luar Jawa melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu, disampaikan implikasi terhadap pengelolaan hutan di Jawa (Perhutani). Kemudian dilanjutkan dengan paparan Prof. San Afri Awang yang menyampaikan bahwa dalam PP. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, intervensi Perhutanan Sosial menjadi sangat penting di Indonesia, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Salah satu polemik terbitnya UUCK terhadap KPH adalah hilangnya Tupoksi KPH untuk membangun bisnis. Namun, KPH sebetulnya tetap bisa membangun kemitraan, seperti yang dituangkan dalam PP 23/2021. Kemitraan ini berbasis 3 pasal, yakni pasal 204, 205, 213 dalam PP 23/2021.

Selanjutnya, Dr. Iman Santoso, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), memaparkan perbandingan sebelum UUCK dan pasca UUCK, dimana adanya UUCK dan peraturan turunannya justru menyebabkan penyelenggaraan kehutanan benar-benar menggunakan pendekatan lanskap, dimana pada UUCK dalam satu lanskap, satu perizinan sudah cukup untuk multiusaha dan dianggap sangat menguntungkan, mudah, dan murah, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Sebagai panelis terakhir, Ir. Madani Mukarom selaku perwakilan dari Asosiasi KPH menyampaikan implikasi dari UUCK adalah menurunnya total organisasi KPH di daerah karena KPH hanya berperan sebagai *cost-centre*. Selain itu, SDM juga akan berkurang karena tugas hanya terbatas untuk fasilitasi. Hal lain yang menjadi perhatian yakni KPH juga harus merevisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), karena usaha kemandiriannya sudah tidak ada. Dampak lain juga termasuk penerimaan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang berhenti/tidak ada lagi. Selain implikasi UUCK, Ir. Madani juga menyoroti adanya perubahan Tupoksi KPH berdasarkan PP 6 dibandingkan dengan PP 23/2021.

Pada akhir acara Dr. Agus Djoko Ismanto, sebagai *Rapporteur*, menyampaikan catatan selama berlangsungnya webinar yang kemudian akan dirumuskan dalam bentuk *policy brief*. Webinar ini merupakan seri pertama dari rangkaian kajian Pembangunan Kehutanan Pasca Undang-undang Cipta Kerja.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis terkait kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

FORCLIME 4.0 siapkan rencana kerja 2021 di Tanah Papua

Dengan ditandatangani Rencana Strategis (Renstra) FORCLIME 4.0 pada tanggal 25 Februari 2021 oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai *Project Executing Agency*, maka Tim FORCLIME segera menindaklanjutinya dengan menyusun rencana kerja 2021. Renstra FORCLIME 4.0 meliputi tiga output, yaitu: Kerangka kebijakan nasional dan daerah; Pengelolaan hutan lestari; Pengembangan kapasitas SDM. Dalam menyiapkan rencana kerjanya, FORCLIME berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan di Papua dan Dinas Kehutanan di Papua Barat, selain itu, juga

dengan universitas yang ada di kedua provinsi tersebut. Penyusunan rencana kerja ini melibatkan mitra terkait di tingkat provinsi dan kabupaten.

Rencana Kerja 2021 FORCLIME 4.0 telah disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan KLHK pada tanggal 31 Maret 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan koordinator untuk Tanah Papua

FORCLIME dan Kemendes jajagi potensi kerja sama terkait pemberdayaan desa | 22 April 2021

Dalam rangka mengidentifikasi potensi kerja sama terkait pemberdayaan desa, termasuk desa adat di Tanah Papua, FORCLIME bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) melalui Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, mengadakan pertemuan koordinasi tanggal 22 April 2021. Pertemuan yang dilakukan secara daring ini membahas potensi kerja sama di lokasi kegiatan FORCLIME di Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah yang beririsan dengan lokasi prioritas Kemendes. Dalam pertemuan tersebut Kemendes menyarankan FORCLIME untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di tingkat kabupaten, karena mereka mempunyai Tupoksi operasional untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaan

kegiatan terkait dengan pemberdayaan desa, FORCLIME akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan di Papua dan Papua Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Dr. Sumarlan mengatakan “Saya berharap kerja sama dengan GIZ ini dapat menyentuh lokasi-lokasi di Indonesia Timur, yang belum pernah kami sentuh sebelumnya, sehingga lokasi-lokasi tersebut akan merasakan kehadiran pemerintah di sana”.

Lanjutan dari pertemuan awal ini akan membahas tentang rencana kegiatan FORCLIME tahun 2021 yang akan disinergikan dengan kegiatan prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

FORCLIME dukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan rancang evaluasi program Bakti Rimbawan 2021

Dalam rangka mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Program Bakti Rimbawan serta tantangan yang dihadapi, Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak FORCLIME untuk bekerja sama melakukan evaluasi Program Bakti Rimbawan. Program Bakti Rimbawan adalah sebuah program rekrutmen alumni Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan dan sarjana (kehutanan dan non kehutanan) untuk ditempatkan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan rencana pengelolaan hutan KPH. Program ini diinisiasi tahun 2013 dengan tujuan untuk membantu KPH dalam memenuhi kebutuhan SDM yang handal dan professional. Pertemuan awal yang membahas rencana kerja sama evaluasi tersebut dilakukan secara daring dan luring pada tanggal 22 April 2021. Dalam pertemuan dibahas kegiatan yang akan dilakukan, termasuk pengumpulan dan analisis data sekunder serta wawancara dengan para pihak.

Beberapa informasi yang akan digali meliputi:

- Capaian (*success story*) serta kontribusi Bakti Rimbawan, baik secara program keseluruhan maupun individu.
- Pemetaan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh peserta Bakti Rimbawan di KPH.
- Implikasi pemberlakuan PP 23/2021 yang antara lain mengubah tugas pokok dan fungsi KPH terhadap arah program Bakti Rimbawan.



- Strategi pemenuhan kebutuhan SDM di KPH pasca Undang-undang Cipta Kerja, yang terkait dengan orientasi kebutuhan SDM dan sumber pembiayaan.

“Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan opsi-opsi *exit strategy* untuk Program Bakti Rimbawan”, kata Dr Iwan Setiawan, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana mendokumentasikan kisah capaian dan pembelajaran pelaksanaan program Bakti Rimbawan dalam sebuah buku kisah bertutur (*story telling*).

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pelaksanaan evaluasi yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni – Juli 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan SDM
Wira Hakim, Advisor junior pengembangan SDM

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270
T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
www.forclime.org
Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



diimplementasikan oleh:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

